

PENGARUH KEBIJAKAN EFISIENSI ANGGARAN TERHADAP KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DI JAKARTA PUSAT

Naila Alifah Putri¹⁾, Safira Aldafina²⁾, Bunayya Tsabita³⁾, Velyna Azzahara⁴⁾,
Humam Sulaiman⁵⁾, John Bly Soemamidjaja⁶⁾, Hamka⁷⁾

^{1,2,3,4,5,6,7)}Politeknik STIA LAN Jakarta

¹nailaalfh1607@gmail.com

ABSTRACT

The Indonesian government is facing fiscal pressures due to increasing infrastructure and social spending. As a responsive measure, the President issued Presidential Instruction No. 1 of 2025 which emphasizes efficiency in the implementation of the state and local budgets. This study aims to identify and examine the impact of the budget efficiency policy in Presidential Instruction No. 1 of 2025 on the quality of education services in central Jakarta and to overcome the negative impact of the policy. The population of this research is students in education institutions in central Jakarta, with a purposive sampling method obtained a sample size of 81 respondents. The data analysis method uses the ordinal regression analysis method. The results showed that the budget efficiency policy referring to Presidential Instruction No. 1 of 2025 had an impact on various aspects of the world of education. This can be seen from the high perception of respondents on statements such as reducing the number of scholarships, limitations in supporting activities, and reducing the number of teaching staff.

Keywords: Budget Efficiency Policy, Central Jakarta, Education Services, Public Policy Impact

ABSTRAK

Pemerintah Indonesia menghadapi tekanan fiskal karena meningkatnya belanja infrastruktur dan sosial. Sebagai langkah responsif, Presiden mengeluarkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 yang menekankan efisiensi dalam pelaksanaan anggaran negara dan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengkaji dampak kebijakan efisiensi anggaran dalam Inpres No. 1 Tahun 2025 terhadap kualitas layanan pendidikan di Jakarta Pusat dan mengatasi dampak negatif dari kebijakan tersebut. Populasi penelitian ini adalah peserta didik di lembaga pendidikan di Jakarta Pusat, dengan metode purposive sampling diperoleh jumlah sampel sebanyak 81 responden. Metode analisis data menggunakan metode analisis regresi ordinal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang mengacu pada Inpres No. 1 Tahun 2025 berdampak pada berbagai aspek dalam dunia pendidikan. Hal ini terlihat dari tingginya persepsi responden terhadap pernyataan-pernyataan seperti pengurangan jumlah beasiswa, pembatasan kegiatan penunjang, dan pengurangan jumlah tenaga pengajar.

Kata kunci: Kebijakan Efisiensi Anggaran, Jakarta Pusat, Layanan Pendidikan, Dampak Kebijakan Publik

PENDAHULUAN

Anggaran dapat diartikan sebagai rencana penerimaan dan pengeluaran dalam kurun waktu satu tahun (Kuntandi & Rosdiana Dian, 2022). Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang kerap disebut sebagai anggaran negara atau anggaran sektor publik dalam berbagai literatur, telah berkembang menjadi instrumen kebijakan multifungsi yang berperan sebagai alat untuk mewujudkan tujuan bernegara. Hal ini terutama tercermin dari struktur dan besaran anggaran yang secara langsung menunjukkan arah serta tujuan pelayanan yang diharapkan oleh pemerintah kepada masyarakat. (Djedje et al., 2020).

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia menghadapi tekanan fiskal akibat meningkatnya beban belanja, termasuk kebutuhan infrastruktur dan sosial. Sebagai respons, Presiden RI menerbitkan Inpres No. 1 Tahun 2025 tentang Percepatan Pelaksanaan Program Prioritas Nasional, yang menekankan efisiensi dalam pelaksanaan APBN dan APBD. Inpres ini menginstruksikan seluruh instansi, termasuk Pemda Jakarta Pusat, untuk menyesuaikan anggaran sesuai tugas masing-masing. Target efisiensi tahun 2025 sebesar Rp306,69 triliun, dengan fokus pada pembatasan belanja non-prioritas dan optimalisasi program prioritas (Pradana, 2025).

Efisiensi dalam pengeluaran pemerintah dapat dimaknai sebagai suatu keadaan di mana tidak ada lagi kemungkinan untuk merelokasikan sumber daya demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain, setiap belanja pemerintah telah memberikan hasil kesejahteraan yang paling optimal. Kondisi ini mencerminkan bahwa pengeluaran pemerintah telah berada pada tingkat efisiensi yang maksimal (Mardiasmo, 2002). Salah satu sektor yang terdampak daripada kebijakan ini ialah sektor Pendidikan. Pendidikan merupakan aspek krusial dan menjadi prioritas utama dalam kehidupan manusia. Melalui pendidikan, setiap individu memiliki peluang untuk meraih tujuan hidupnya. Dalam konteks kehidupan berbangsa, Pendidikan juga berperan sebagai landasan fundamental dalam proses pembangunan suatu negara (Dzaky Satria et al., 2025).

Anggaran pendidikan merupakan instrumen strategis dalam mencapai tujuan pendidikan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Namun, besaran anggaran tidak secara langsung berbanding lurus dengan keberhasilan proses pembelajaran. Justru, efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran menjadi faktor penentu utama dalam meningkatkan kualitas hasil belajar peserta didik (Muslich, 2015). Tujuan utama dari kebijakan efisiensi anggaran adalah menciptakan sistem pengelolaan keuangan negara yang berorientasi pada hasil, meningkatkan akuntabilitas serta transparansi penggunaan anggaran, dan memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan dampak nyata bagi masyarakat (Fitri & Kurniawati, 2021).

Namun, implementasi kebijakan efisiensi anggaran tidak lepas dari berbagai tantangan yang kompleks, terutama di sektor pendidikan. Salah satu tantangan utamanya adalah kemampuan satuan pendidikan dalam menyesuaikan diri dengan pengurangan belanja tanpa mengorbankan kualitas layanan. Banyak sekolah menghadapi keterbatasan dalam perencanaan anggaran berbasis kinerja, sehingga pemangkasan anggaran sering kali berdampak langsung pada komponen-komponen vital seperti penyediaan bahan ajar, dan pemeliharaan fasilitas.

Kebaruan dari penelitian ini adalah fokus kontekstual pada wilayah Jakarta Pusat yang memiliki kompleksitas sosial dan ekonomi yang tinggi. Berbeda dengan studi terdahulu yang cenderung bersifat nasional atau makro, penelitian ini menitikberatkan pada pengalaman dan persepsi masyarakat lokal terhadap perubahan kualitas layanan pendidikan akibat kebijakan efisiensi anggaran. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan efisiensi anggaran di sektor pendidikan di Jakarta Pusat, mengidentifikasi dampaknya terhadap kualitas layanan pendidikan, serta merumuskan strategi alternatif yang dapat meminimalkan dampak negative kebijakan tersebut.

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pada pengembangkan kajian kebijakan publik, serta menjadi referensi akademik bagi peneliti lain dalam kajian kebijakan efisiensi dan kualitas layanan publik. Juga, secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi bagi pemerintah daerah DKI Jakarta dalam mengevaluasi kebijakan efisiensi anggaran agar tidak menurunkan kualitas pendidikan,

serta menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan pendidikan dalam merancang strategi efisiensi anggaran yang tetap menjaga standar pelayanan pendidikan.

KAJIAN LITERATUR

Teori Kebijakan

Kebijakan adalah serangkaian tindakan, keputusan, dan langkah terencana yang diambil oleh pemerintah atau pihak terkait untuk menyelesaikan masalah masyarakat dan mencapai tujuan tertentu. Kebijakan disusun secara sistematis dan tidak terjadi secara kebetulan (Desrinelti et al., 2021). Menurut (Herdiana, 2016) Kebijakan merupakan serangkaian tindakan, rencana, dan keputusan yang diambil oleh pihak terkait untuk menyelesaikan masalah dan mencapai tujuan tertentu dalam waktu dan dengan sumber daya yang tersedia. Sebagai pedoman, kebijakan memiliki peran mendasar dalam mewujudkan tujuan bersama.

Pelaksanaan kebijakan mencakup tiga komponen utama, yaitu: (1) Perincian program, yang meliputi lokasi, cara pelaksanaan, dan interpretasi kebijakan; (2) Alokasi sumber daya, mencakup pendanaan, tenaga kerja, serta lembaga pelaksana; dan (3) Keputusan, yang berkaitan dengan penetapan tindakan yang akan dijalankan (Jann & Wegrich, 2007).

Kebijakan Efisiensi Anggaran

Kebijakan efisiensi anggaran publik merupakan strategi pemerintah untuk mengoptimalkan penggunaan dana negara agar setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Kebijakan ini mencakup pengurangan belanja tidak produktif, seperti perjalanan dinas dan kegiatan seremonial, serta penguatan pendanaan untuk program yang memberikan dampak langsung, termasuk di bidang pendidikan.

Dalam penelitian (Zein et al., 2025), efisiensi anggaran publik didefinisikan sebagai kebijakan yang bertujuan untuk optimalisasi penggunaan sumber daya untuk memberikan manfaat sosial yang maksimal.

Kualitas Layanan Pendidikan

Kualitas pendidikan adalah aspek fundamental yang harus terus ditingkatkan oleh sebuah instansi pendidikan secara berkelanjutan. Peningkatan mutu pendidikan akan memastikan keberlangsungan instansi pendidikan dan kemampuannya untuk bersaing dengan institusi pendidikan lainnya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mutu atau kualitas didefinisikan sebagai tolak ukur untuk menilai baik buruknya suatu objek, serta tingkatan atau derajat tertentu (misalnya, dalam hal kepandaian atau kecerdasan). (Nur Indahsari & Roni, 2022) berpendapat bahwa pelayanan adalah rangkaian aktivitas yang berlangsung dalam interaksi langsung antara individu dengan individu lain atau dengan mesin secara fisik, yang bertujuan untuk memberikan kepuasan kepada individu atau kelompok. Usaha ini melibatkan tindakan membantu, menyiapkan, dan mengurus berbagai keperluan orang lain agar kebutuhan mereka terpenuhi dengan baik.

Menurut (Tjiptono, 2004), kualitas pelayanan adalah upaya menyediakan layanan yang memenuhi kebutuhan dan harapan konsumen secara tepat waktu. Sementara itu, (Sudjiani et al., 2019) mendefinisikan kualitas layanan pendidikan sebagai tingkat keunggulan dalam pengelolaan pendidikan yang efektif dan efisien untuk menghasilkan keunggulan

peserta didik. Secara umum, kualitas layanan pendidikan mencerminkan sejauh mana layanan memenuhi atau melampaui harapan. Jika layanan melampaui harapan, dianggap berkualitas tinggi; jika sesuai harapan, dianggap memuaskan; dan jika di bawah harapan, dianggap kurang berkualitas.

Pengaruh Anggaran Terhadap Kualitas Layanan Pendidikan

Anggaran pendidikan memiliki peran penting dalam peningkatan kualitas pendidikan. Berdasarkan analisis statistik, peningkatan 1% dalam pembiayaan pendidikan dapat meningkatkan kualitas pendidikan sebesar 0,726 poin. Namun, hanya 44,6% kualitas pendidikan yang dipengaruhi oleh anggaran, sementara 55,4% lainnya ditentukan oleh faktor lain seperti sarana prasarana dan kualitas tenaga pendidik.

Hasil penelitian (Chairyani & Rahman, 2022) mengindikasikan bahwa alokasi anggaran pendidikan yang memadai memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kualitas sekolah. Ketersediaan dana yang cukup memungkinkan sekolah menyelenggarakan berbagai program peningkatan mutu, termasuk pengadaan fasilitas, pelatihan tenaga pendidik, serta pelaksanaan kegiatan pendidikan yang bersifat inovatif.

Dalam praktiknya, dana pendidikan juga dimanfaatkan untuk mendukung implementasi kebijakan, pelaksanaan program sekolah, kegiatan intra dan ekstrakurikuler, serta pengembangan sekolah sebagai institusi pendidikan yang berkualitas (Mahadi & Konadi, 2022). Selain itu, meskipun dana untuk pelatihan dan sertifikasi guru telah ditingkatkan, pengaruhnya terhadap mutu pengajaran belum sepenuhnya terlihat. Hal ini menunjukkan bahwa selain alokasi anggaran, pengelolaan yang efektif dan distribusi yang tepat menjadi kunci untuk memastikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pendidikan.

Dampak Kebijakan Efisiensi Anggaran Terhadap Kualitas Layanan Pendidikan

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD memiliki dampak signifikan terhadap pengelolaan keuangan negara dan daerah. Berikut adalah beberapa dampak utama dari kebijakan ini:

a. Dampak Positif:

1. Pengurangan pemborosan

Dengan membatasi pengeluaran yang bukan prioritas, seperti perjalanan dinas, honorarium berlebih, dan acara seremonial, pemerintah dapat meminimalkan pengeluaran yang kurang penting dan tidak efisien.

2. Peningkatan akuntabilitas dan transparansi

Langkah peninjauan dan penyesuaian anggaran mendorong lembaga pemerintahan untuk lebih cermat dan terbuka dalam mengelola anggaran yang mereka gunakan.

3. Penataan ulang skala prioritas pembangunan

Kebijakan ini menuntut pemerintah pusat dan daerah untuk lebih fokus dalam menyusun program-program yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat, bukan sekadar menjalankan rutinitas administratif.

b. Dampak Negatif:

1. Pemangkasan layanan publik

Pengurangan alokasi anggaran pada beberapa instansi seperti BMKG maupun Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berpotensi menurunkan kualitas pelayanan publik, khususnya dalam aspek pemeliharaan fasilitas, pengadaan peralatan, dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur.

2. Penundaan atau pembatalan proyek strategis

Pembatasan anggaran menyebabkan sejumlah proyek strategis yang tidak termasuk dalam kategori prioritas berisiko mengalami penundaan pelaksanaan atau bahkan dibatalkan, sehingga dapat menghambat capaian target pembangunan jangka menengah dan panjang.

3. Potensi menurunnya kepuasan masyarakat

Efisiensi yang dilakukan tanpa diimbangi dengan peningkatan efektivitas pelayanan publik berpotensi menimbulkan ketidakpuasan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh persepsi publik terhadap penurunan kualitas layanan yang mereka terima secara langsung.

Strategi Kebijakan Efisiensi Anggaran Terhadap Kualitas Layanan Pendidikan

Dalam menghadapi berbagai dampak negatif dari kebijakan efisiensi anggaran di sektor pendidikan, diperlukan sejumlah strategi yang bersifat adaptif dan solutif agar kualitas pelayanan publik tetap terjaga. Beberapa strategi yang dapat diterapkan antara lain sebagai berikut:

- a. Optimalisasi anggaran melalui pendekatan Zero-Based Budgeting (ZBB)
Untuk mengatasi dampak pemangkasan layanan publik, strategi yang dapat dilakukan adalah dengan menerapkan metode penyusunan anggaran berbasis nol atau *Zero-Based Budgeting*. Metode ini mewajibkan setiap unit kerja untuk menyusun anggaran dari awal dan membuktikan relevansi serta urgensi setiap kegiatan yang diusulkan. Dengan pendekatan ini, belanja yang tidak bersifat prioritas dapat dieliminasi tanpa mengorbankan layanan esensial seperti pemeliharaan fasilitas pendidikan atau pengadaan sarana penunjang pembelajaran (Mekari Jurnal Editoria, 2022).
- b. Pemanfaatan Skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBUs)
Menanggapi kemungkinan terhambatnya proyek-proyek strategis akibat keterbatasan anggaran, pemerintah dapat mengupayakan kerja sama dengan pihak swasta melalui skema KPBUs. Skema ini memungkinkan pembiayaan proyek tetap berjalan dengan dukungan investor, tanpa membebani anggaran negara secara langsung. Dengan demikian, proyek infrastruktur pendidikan dan pelayanan publik lainnya tetap dapat direalisasikan secara berkelanjutan (Purwanto, 2021).
- c. Peningkatan Efisiensi Melalui Digitalisasi Layanan Publik
Untuk mengatasi potensi penurunan kepuasan masyarakat akibat pengurangan layanan, solusi yang dapat ditempuh adalah optimalisasi teknologi digital dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Digitalisasi administrasi pendidikan, pemanfaatan platform pembelajaran daring, dan pengembangan perpustakaan digital merupakan contoh konkret yang mampu mempertahankan kualitas layanan meskipun dengan anggaran terbatas. Selain itu, strategi ini turut meningkatkan efisiensi serta transparansi tata kelola layanan pendidikan (Kemendikdasmen, 2022).

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengevaluasi sejauh mana dampak kebijakan efisiensi anggaran terhadap kualitas layanan pendidikan di Jakarta. Metode kuantitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pengumpulan dan pengolahan data dalam bentuk angka (numerik) guna memperoleh gambaran objektif terkait hubungan antarvariabel. Data yang dikumpulkan melalui kuesioner dianalisis

menggunakan teknik statistik untuk mengidentifikasi hubungan sebab-akibat antara kebijakan efisiensi anggaran dan kualitas layanan pendidikan yang diterima oleh para pemangku kepentingan di sektor pendidikan.

Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui penyebaran kuesioner terbuka kepada responden yang merupakan peserta didik di sejumlah institusi pendidikan di wilayah Jakarta Pusat. Kuesioner disusun dengan menggunakan skala Likert untuk mengukur persepsi peserta didik terhadap dampak kebijakan efisiensi anggaran terhadap kualitas layanan pendidikan yang mereka terima. Metode ini dipilih karena mampu menghasilkan data kuantitatif yang sistematis, sehingga dapat dianalisis lebih lanjut dengan pendekatan statistik untuk mengetahui kecenderungan dan pola hubungan antarvariabel.

Metode Analisis Data

- a. Uji Validitas dan Reliabilitas: : Menggunakan Uji Cronbach's Alpha untuk mengukur konsistensi kuesioner.
- b. Analisis Ordinal Regresi: digunakan untuk memprediksi hubungan antara satu atau lebih variabel independen dengan variabel dependen yang berskala ordinal.

Hipotesis

- a. Hipotesis Nol (H_0):
Tidak terdapat pengaruh signifikan antara kebijakan efisiensi anggaran terhadap kualitas layanan pendidikan di Jakarta Pusat.
- b. Hipotesis Alternatif (H_1):
Terdapat pengaruh signifikan antara kebijakan efisiensi anggaran terhadap kualitas layanan pendidikan di Jakarta Pusat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Pada penelitian ini, terdapat 81 responden yang terdiri dari 65% perempuan dan 35% laki-laki. Dan seluruh responden merupakan peserta didik dari instansi pendidikan yang ada di Jakarta pusat.

Uji kualitas data

Data dikumpulkan menggunakan instrumen berupa kuesioner, yang kemudian dianalisis melalui uji validitas dan reliabilitas. Kuesioner berperan sebagai alat ukur dalam penelitian untuk menilai variabel-variabel yang diteliti, sehingga diperlukan pengujian validitas terlebih dahulu terhadap setiap variabel sebelum dilakukan pengujian reliabilitas. Dalam pengujian validitas dan reliabilitas ini, digunakan sebanyak 81 responden sebagai sampel. Sebuah item dikatakan valid apabila nilai r_{hitung} lebih besar daripada r_{tabel} . Nilai r_{tabel} diperoleh dengan menggunakan rumus derajat kebebasan (df) yaitu $N - 2$, sehingga $df = 81 - 2 = 79$. Maka di dapatkan angka, $r_{tabel} sebesar 0,2185 dengan taraf signifikansi 5\%$.

Tabel 1. Uji Validitas

Pernyataan	r hitung	r tabel	Keterangan
X.1–	0,487	0,2185	Valid
	0,448	0,2185	Valid
	0,715	0,2185	Valid
	0,466	0,2185	Valid
	0,498	0,2185	Valid
	0,587	0,2185	Valid
-X.7	0,599	0,2185	Valid
Y.1–	0,642	0,2185	Valid
	0,641	0,2185	Valid
	0,699	0,2185	Valid
	0,419	0,2185	Valid
	0,650	0,2185	Valid
	0,710	0,2185	Valid
-Y.7	0,722	0,2185	Valid

Sumber: Hasil Olahan Peneliti (2025)

Berdasarkan output tersebut, kedua variabel yang dianalisis memiliki nilai r hitung yang lebih tinggi dari r tabel sebesar 0,2185. Hal ini menunjukkan bahwa *item-item* dalam instrumen penelitian dinyatakan valid dan layak digunakan untuk proses analisis selanjutnya.

Uji Reliabilitas

Tabel 2. Uji Reabilitas

Variabel Penelitian	Cronbach's Alpha	N of Items	Keterangan
Efisiensi Anggaran dan Kualitas layanan Pendidikan	.856	14	Reliabel

Sumber: Hasil Olahan Peneliti (2025)

Melalui tabel diatas, dapat diketahui nilai *Cronbach's Alpha* yang didapatkan sebesar 0,856. Pada uji ini kriteria yang harus dipenuh adalah nilai *Cronbach's Alpha* yang dihasilkan harus lebih besar dibandingkan 0,6, maka data yang digunakan dalam uji ini

dapat dinyatakan reliabel. Dikarenakan nilai *Cronbach's Alpha* (0,856) yang dihasilkan melebihi 0,6, maka data dalam pengujian ini dinyakatakan reliabel.

Uji Normalitas

Tabel 3. Uji Normalitas

		Unstandardized Predicted Value
N		87
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	28.5862069
	Std. Deviation	3.05035181
Most Extreme Differences	Absolute	.245
	Positive	.125
	Negative	-.245
Test Statistic		.245
Asymp. Sig. (2-tailed)		.000 ^c

Sumber: Hasil Olahan Peneliti (2025)

Menurut analisis dari output SPSS versi 25, nilai signifikansi Asymp.Sig (2-tailed) tercatat sebesar 0,000. Nilai ini lebih kecil dibandingkan dengan batas signifikansi 0,05 yang berarti data tidak berdistribusi normal. Meskipun telah dilakukan berbagai metode transformasi data seperti logaritma, akar kuadrat, dan inverse, hasil uji normalitas tetap menunjukkan distribusi data yang tidak normal. Hal ini dapat terjadi karena bentuk data yang berskala ordinal (menggunakan skala Likert) dan karena distribusi asli data yang memang tidak simetris.

Karena data tidak memenuhi asumsi normalitas, maka pendekatan statistik non-parametrik menjadi alternatif yang lebih sesuai. Oleh karena itu, untuk pengujian pengaruh antar variabel, digunakan regresi ordinal, yang memang dirancang untuk data berskala ordinal dan tidak mengharuskan distribusi normal.

Uji Ordinal Regresi

Tabel 4. Uji Ordinal Regresi

Model	-2 Log Likelihood	Chi- Square	df	Sig.
Intercept Only	272.185			
Final	98.074	174.111	15	.000
Link function: Logit.				

Sumber: Hasil Olahan Peneliti (2025)

Nilai *Chi-Square* yang diperoleh sebesar [272.185] dengan tingkat signifikansi sebesar **[0.000]**, yang lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi ordinal secara keseluruhan signifikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa model tersebut layak digunakan untuk menganalisis pengaruh kebijakan efisiensi anggaran terhadap kualitas layanan pendidikan di Jakarta Pusat.

Tabel 5. Uji Ordinal Regresi

	Chi-Square	df	Sig.
Pearson	332.393	210	.000
Deviance	111.170	210	1.000
Link function: Logit.			

Sumber: Hasil Olahan Peneliti (2025)

Berdasarkan output SPSS, hasil uji *Deviance* menunjukkan nilai *Chi-Square* sebesar 111.170 dengan signifikansi sebesar 1.000. Nilai signifikansi pada uji *Deviance* yang lebih besar dari 0,05 (yaitu 1.000) menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara model dan data, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi ordinal yang dibangun memiliki kecocokan (*fit*) yang baik dengan data.

Tabel 6. Uji Ordinal Regresi

Cox and Snell	.865
Nagelkerke	.872
McFadden	.414
Link function: Logit.	

Sumber: Hasil Olahan Peneliti (2025)

Berdasarkan hasil analisis regresi ordinal, diperoleh nilai **Nagelkerke sebesar 0.872**, Angka ini menunjukkan bahwa 87,2% variabilitas dalam variabel Kualitas layanan pendidikan (Y) dapat dijelaskan oleh variabel Efisiensi anggaran (X).

Sementara itu, sisanya (100% - 87,2% = 12,8%) dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi ini. Ini menunjukkan bahwa hubungan antara kedua variabel tergolong sangat kuat.

Tabel 7. Uji Ordinal Regresi

Estimate	Std. Error	Wald	Sig.	95% Confidence Interval	
				Lower Bound	Upper Bound
[EfisiensiAnggaran=13]	-47.822 .368	8449 .000	.000	-16608.278	16512.635
[EfisiensiAnggaran=15]	17.607	.000	.	17.607	17.607

[EfisiensiAnggaran=21]	-12.091 4	2.15 4	31.51 7	.000	-16.312	-7.870
[EfisiensiAnggaran=22]	-6.967 6	2.06 6	11.36 6	.001	-11.017	-2.917
[EfisiensiAnggaran=23]	-9.769 6	1.91 6	25.99 9	.000	-13.524	-6.014
[EfisiensiAnggaran=24]	-8.910 1	2.42 1	13.55 0	.000	-13.654	-4.166
[EfisiensiAnggaran=25]	-9.235 1	2.09 1	19.51 0	.000	-13.333	-5.137
[EfisiensiAnggaran=26]	-9.900 5	1.98 5	24.87 5	.000	-13.791	-6.010
[EfisiensiAnggaran=27]	-7.953 7	1.83 7	18.74 1	.000	-11.554	-4.353
[EfisiensiAnggaran=29]	-7.766 9	1.75 9	19.49 9	.000	-11.213	-4.319
[EfisiensiAnggaran=30]	-6.543 4	1.68 4	15.09 3	.000	-9.844	-3.242
[EfisiensiAnggaran=31]	-5.118 5	1.65 5	9.563	.002	-8.362	-1.874
[EfisiensiAnggaran=32]	-4.305 4	1.69 4	6.461	.011	-7.624	-.986
[EfisiensiAnggaran=33]	-6.933 7	1.86 7	13.78 8	.000	-10.592	-3.273
[EfisiensiAnggaran=34]	17.607 .619	7259 .619	.000	.998	-14210.986	14246.200
[EfisiensiAnggaran=35]	0 ^a

Sumber: Hasil Olahan Peneliti (2025)

Dari output di atas bisa dilihat bahwa nilai signifikansi lebih kecil dibandingkan taraf signifikansi yaitu 0,05. Hal ini menunjukan bahwa efisiensi anggaran berpengaruh terhadap kualitas layanan pendidikan

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner pada responden yang terdiri dari tenaga pendidik dan peserta didik di wilayah Jakarta Pusat, pelaksanaan kebijakan efisiensi anggaran yang merujuk pada Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 telah berdampak pada berbagai aspek

dalam dunia pendidikan. Hal ini terlihat dari tingginya persepsi responden terhadap pernyataan seperti pengurangan jumlah beasiswa, keterbatasan dalam kegiatan pendukung, dan pengurangan jumlah tenaga pengajar. Kebijakan efisiensi ini juga diketahui berdampak terhadap cara belajar dan mengajar, di mana sebagian responden menyatakan bahwa mereka harus melakukan penyesuaian karena keterbatasan dana.

Melalui hasil analisis regresi ordinal yang dilakukan, diperoleh sejumlah temuan penting. Model fitting information menunjukkan bahwa model akhir memiliki peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan model kosong (*intercept only*), dengan nilai *Chi-Square* sebesar 174.111 dan signifikansi 0.000. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan secara statistik layak dan signifikan untuk menjelaskan hubungan antara efisiensi anggaran dan kualitas layanan Pendidikan.

Pada uji *goodness-of-fit*, nilai *Deviance* menunjukkan signifikansi sebesar 1.000 (> 0.05), yang menandakan bahwa model memiliki kecocokan (fit) yang baik dengan data. Sementara itu, nilai *pseudo R-Square Nagelkerke* sebesar 0.872. Angka ini menunjukkan bahwa 87,2% variabilitas dalam variabel Kualitas layanan pendidikan (Y) dapat dijelaskan oleh variabel Efisiensi anggaran (X).

Hasil analisis parameter estimasi menunjukkan bahwa beberapa indikator efisiensi anggaran, seperti pengurangan beasiswa, pengurangan tenaga pengajar, keterbatasan kegiatan pendukung, dan penyesuaian jadwal belajar, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap persepsi responden terhadap kualitas layanan pendidikan. Hal ini menunjukkan adanya ambivalensi persepsi, di mana efisiensi di satu sisi dinilai dapat menciptakan pengelolaan anggaran yang baik, namun di sisi lain menimbulkan konsekuensi terhadap keterbatasan sumber daya pendidikan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan efisiensi anggaran melalui Inpres No. 1 Tahun 2025 memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas layanan pendidikan di Jakarta Pusat. Maka dapat dikatakan jika hipotesis H_1 Diterima.

Strategi Alternatif

Melalui hasil dan pembahasan mengenai pengaruh Efisiensi Kebijakan Anggaran terhadap Kualitas Layanan Pendidikan di Jakarta pusat yang telah dipaparkan, berikut beberapa strategi yang bisa diterapkan untuk mengurangi dampak negatif dari kebijakan tersebut.

- a. Optimalisasi Anggaran melalui Pendekatan Zero-Based Budgeting (ZBB)
Untuk mengatasi dampak pemangkasan layanan publik, strategi yang dapat dilakukan adalah dengan menerapkan metode penyusunan anggaran berbasis nol atau *Zero-Based Budgeting*. Metode ini mewajibkan setiap unit kerja untuk menyusun anggaran dari awal dan membuktikan relevansi serta urgensi setiap kegiatan yang diusulkan. Dengan pendekatan ini, belanja yang tidak bersifat prioritas dapat dieliminasi tanpa mengorbankan layanan esensial seperti pemeliharaan fasilitas pendidikan atau pengadaan sarana penunjang pembelajaran (Mekari Jurnal Editoria, 2022).
- b. Pemanfaatan Skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPB)
Menanggapi kemungkinan terhambatnya proyek-proyek strategis akibat keterbatasan anggaran, pemerintah dapat mengupayakan kerja sama dengan pihak swasta melalui skema KPB. Skema ini memungkinkan pembiayaan proyek tetap berjalan dengan dukungan investor, tanpa membebani anggaran negara secara

langsung. Dengan demikian, proyek infrastruktur pendidikan dan pelayanan publik lainnya tetap dapat direalisasikan secara berkelanjutan (Purwanto, 2021).

c. Peningkatan Efisiensi Melalui Digitalisasi Layanan Publik

Untuk mengatasi potensi penurunan kepuasan masyarakat akibat pengurangan layanan, solusi yang dapat ditempuh adalah optimalisasi teknologi digital dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Digitalisasi administrasi pendidikan, pemanfaatan platform pembelajaran daring, dan pengembangan perpustakaan digital merupakan contoh konkret yang mampu mempertahankan kualitas layanan meskipun dengan anggaran terbatas. Selain itu, strategi ini turut meningkatkan efisiensi serta transparansi tata kelola layanan Pendidikan (Kemendikdasmen, 2022).

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian mengenai dampak kebijakan efisiensi anggaran berdasarkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 terhadap kualitas layanan pendidikan di Jakarta Pusat. Melalui pendekatan kuantitatif terhadap 87 responden, ditemukan bahwa efisiensi anggaran berpengaruh signifikan terhadap penurunan layanan pendidikan, terutama dalam hal pengurangan fasilitas, kegiatan pembelajaran, serta tenaga pengajar. Hasil regresi ordinal menunjukkan bahwa 87,2% variasi kualitas layanan pendidikan dijelaskan oleh kebijakan efisiensi ini, menunjukkan dampak yang substansial. Meski bertujuan mengoptimalkan belanja negara, efisiensi yang tidak mempertimbangkan karakteristik sektor pendidikan dapat mengganggu hak atas pendidikan yang layak.

Sebagai solusi, disarankan penggunaan pendekatan *Zero-Based Budgeting*, kerja sama KPBUs, serta pemanfaatan teknologi digital agar efisiensi tetap berjalan tanpa mengorbankan mutu pendidikan. Pemerintah perlu menyeimbangkan kebutuhan penghematan dengan tanggung jawab penyediaan layanan publik yang berkualitas, terutama di sektor pendidikan yang sangat sensitif terhadap perubahan anggaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Chairyani, D., & Rahman, K. (2022). *Pengaruh Biaya Pendidikan Terhadap Mutu Sekolah Di Sekolah Menengah Pertama Swasta*. <https://ejournal.undikma.ac.id/index.php/visionary>
- Desrinelti, D., Afifah, M., & Gistituati, N. (2021). Kebijakan publik: konsep pelaksanaan. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 6(1), 83. <https://doi.org/10.29210/3003906000>
- Djedje, P. ;, Aziz, A., Dan, S. H., Sigit, D., Surono Perevisi, E., Djedje, I. :, & Surono, E. (2020). *Judul Modul : Sistem Administrasi Keuangan Negara II*.
- Dzaky Satria, Ihsan Hutama Kusasih, & Gusmaneli Gusmaneli. (2025). Analisis Rendahnya Kualitas Pendidikan di Indonesia Saat Ini : Suatu Kajian Literatur. *Jurnal Bintang Pendidikan Indonesia*, 3(2), 292–309. <https://doi.org/10.55606/jubpi.v3i2.3838>
- Fitri, M., & Kurniawati, I. (2021). Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Terhadap Kualitas Pelayanan Pendidikan. *Jurnal Keberlanjutan: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 2(8).
- Herdiana, D. (2016). Sosialisasi Kebijakan Publik: Pengertian dan Konsep Dasar. *Jurnal Ilmiah Wawasan Insan Akademik*, 1(3).

- Jann, W., & Wegrich, K. (2007). *Handbook of Public Policy Analysis* (F. Fischer, G. J. Miller, & M. S. Sidney, Eds.; 1st ed.). CRC Press.
- Kemendikdasmen. (2022). *Digitalisasi pendidikan* .
<Https://Www.Kemendikdasmen.Go.Id>.
- Kuntandi, C., & Rosdiana Dian. (2022). Faktor-faktor yang Memengaruhi Efektivitas Penyerapan Anggaran Belanja Pendidikan: Perencanaan Anggaran, Peraturan, Koordinasi (Literature Review). *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 4(2), 2.
- Mahadi, M., & Konadi, W. (2022). Pengaruh Anggaran Pendidikan, Kualitas Pendidikan Dan Akreditasi Sekolah Terhadap Kualitas Lulusan (Studi Kasus Sma Di Provinsi Aceh Tahun 2017-2019). *Indomera*, 1(2).
<https://doi.org/10.55178/idm.v1i2.200>
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi.
- Mekari Jurnal Editoria. (2022, June 16). *Zero Based Budgeting, Metode Anggaran Tak Bersisa yang Wajib Diketahui*. <Https://Www.Jurnal.Id>.
<https://www.jurnal.id/id/blog/zero-based-budgeting-metode-anggaran-tak-bersisa-yang-wajib-diketahui/>
- Muslich, M. (2015). *Manajemen Pendidikan: Teori dan Praktik*. Bumi Aksara.
- Nur Indahsari, L., & Roni, M. (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Harga, Dan Lokasi Terhadap Keputusan Pembelian Di Kedai Kopi BE Kalirejo. *Margin: Jurnal Bisnis Islam Dan Perbankan Syariah*, 51–60.
<https://doi.org/10.58561/margin.v1i1.18>
- Pradana, I. P. N. A. (2025, April 9). *Langkah Strategis dan Tantangan Pelaksanaan Anggaran Pasca Efisiensi Berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025*.
<Https://Djpb.Kemenkeu.Go.Id/>.
- Purwanto, E. A. (2021). *Siapa yang Membayai Proyek pada Skema KPBU?*
<Https://Kpbu.Kemenkeu.Go.Id>.
- Sudjiani, E., Subarto, & Kusjono, G. (2019). Pengaruh Citra dan Kualitas Layanan Pendidikan terhadap Kepuasan Peserta Didik di Sekolah Cikal Harapan. *Jurnal Ilmiah Feasible (JIF)*, 1(2), 123–137.
- Tjiptono, F. (2004). *Manajemen Jasa* (2nd ed.). Penerbit Andi.
- Zein, A. W., Riski, M., & Nasution, A. Z. P. (2025). Efisiensi Penggunaan Anggaran Publik dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial . *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Akuntansi, Dan Pajak (JIEAP)* , 2(2).